

BAB I

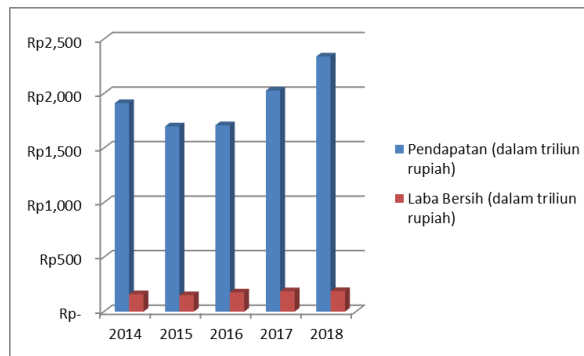
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian secara nasional yang diharapkan mampu mewujudkan dan memenuhi kesejahteraan masyarakat diberbagai macam sektor. Beberapa sektor perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di BEI hingga akhir 2016 berjumlah 20 perusahaan yang terdiri dari empat perusahaan sektor perbankan, dua perusahaan sektor farmasi, satu perusahaan sektor energi, satu perusahaan sektor logam, empat perusahaan sektor konstruksi, tiga perusahaan sektor pertambangan, dua perusahaan sektor semen, dua perusahaan sektor angkutan, dan satu perusahaan sektor telekomunikasi.

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang berperan penting dalam memberikan sumbangan terhadap perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Penerimaan negara tersebut di peroleh dari pendapatan dan laba bersih yang dihasilkan oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Berikut ini merupakan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih perusahaan Badan Usaha Milik Negara selama tahun 2014-2018:



Gambar 1.1 Pertumbuhan Pendapatan dan Laba Bersih BUMN

Sumber : Diolah oleh penulis (2019)

Dalam lima tahun terakhir, pendapatan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang tercatat sangat berfluktuatif selama tahun 2014-2018. Pencapaian tumbuh dari Rp 1.912 triliun pada 2014, Rp1.699 triliun pada 2015, Rp1.710 triliun pada 2016, Rp2.027 triliun pada 2017, dan Rp2.339 triliun pada 2018. Sehingga jumlah laba bersih yang dikantongi tiap periode yaitu Rp 159 triliun pada 2014, Rp150 triliun pada 2015, Rp176 triliun pada 2016, Rp186 triliun pada 2017, dan Rp188 triliun pada 2018 (Hidayat, 2019).

Pernah ditemukan beberapa kasus kecurangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dalam hal perhitungan akuntansi. Perusahaan milik pemerintah diduga membuat laporan seolah-olah laba yang diterima lebih besar dari laba yang sebenarnya. Modus tersebut dilakukan dengan melaporkan pendapatan perusahaan yang sebetulnya belum masuk. Tujuannya, agar direksi mendapat bonus lebih besar (ACFE, 2016).

Penelitian ini akan mengambil perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2018 sebagai objek penelitian terkait. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang berhubungan dengan kasus kecurangan laporan keuangan. Data perusahaan yang menjadi objek penelitian didapatkan dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang dapat diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dalam suatu siklus akuntansi pasti akan menghasilkan tujuan akhir yaitu laporan keuangan. Menurut Kasmir (2014) laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pembuatan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (IAI, 2016). Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebutkan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemerintah serta lembaga keuangan, dan masyarakat.

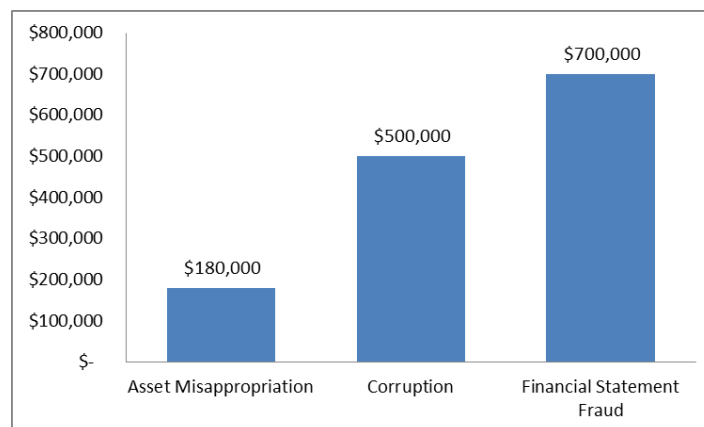
Sihombing dan Raharjo (2014) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan ekonomi laporan keuangan dipengaruhi faktor-faktor, seperti keadaan perekonomian, politik dan prospek industri. Komponen laporan keuangan yang diterapkan di Indonesia sudah semakin komprehensif. Namun, ada banyak celah dalam laporan keuangan yang dapat menjadi ruang bagi manajemen dan oknum tertentu untuk melakukan kecurangan pada laporan keuangan. Menurut Elder et al. (2011) menyatakan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah atau pun pengungkapan yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya.

Terjadinya kecurangan laporan keuangan juga dijelaskan dari teori agensi yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori agensi merupakan sebuah kontrak dimana pemegang saham (*principal*) melibatkan manajemen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka. *Agent* akan selalu bertindak yang terbaik demi kepentingan *principal*. Ketika terjadi perbedaan kepentingan akan menyebabkan adanya konflik. *Agent* yang merupakan bagian internal dari perusahaan tentu saja akan memiliki informasi lebih dibandingkan dengan *principal*. Hal ini akan dimanfaatkan oleh *agent* untuk memilah informasi mana yang akan di sampaikan kepada *principal*. Kondisi inilah yang menjadi celah *agent* untuk melakukan kecurangan (Rachmawati dan Marsono, 2014).

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada periode 2012 hingga 2016 menunjukkan terjadinya pertumbuhan kecurangan laporan keuangan secara global yang berarti masih banyak perusahaan yang mencoba untuk memanipulasi data laporan keuangan. *Fraud* merupakan bahaya laten yang mengancam dunia. Hasil penelitian *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Global tahun 2016 menunjukkan bahwa setiap tahun rata-rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban *fraud*. Ada tiga skema dasar jenis fraud yang diteliti oleh ACFE ini:

- a. Penyalahgunaan Aktiva/Kekayaan (*Asset Misappropriation*)
- b. Korupsi (*Corruption*)
- c. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Namun menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam *Report to the Nations Global Study on Occupational Fraud and Abuse Asia-Pacific Edition* tahun 2018 menemukan bahwa *Financial Statement Fraud* merupakan jenis *fraud* yang paling banyak menyebabkan kerugian secara finansial dibandingkan jenis *fraud* lain seperti *asset misappropriation* dan *corruption*. Pada Gambar 1.3, dapat dilihat bahwa *financial statement fraud* menyebabkan kerugian sebesar \$700,000 dibandingkan dengan dua jenis fraud yang hanya sebesar \$500,000 (*corruption*) dan \$180,000 (*asset misappropriation*).



Gambar 1.2 Tiga Jenis *Fraud* ACF dan Jumlah Kerugian

Sumber: ACFE - *Report to the Nations Global Study on Occupational Fraud and Abuse Asia-Pacific Edition* (2018)

Kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh siapa saja pada level apa pun dan siapa pun yang memiliki kesempatan. Urutan keterlibatan pelaku dijelaskan sebagai berikut : Senior manajemen (CEO, CFO, dan lain-lain). CEO terlibat *fraud* pada tingkat 72%, sedangkan CFO pada tingkat 43 %. Lalu ada karyawan tingkat menengah dan tingkat rendah. Mereka dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja mereka yang buruk atau untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kinerja yang lebih tinggi, (Sihombing dan Rahardjo, 2014).

Terdapat beberapa kasus *fraud* di Indonesia yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan BUMN terhadap laporan keuangannya. Meskipun kecurangan merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan auditor dan manajemen perusahaan berkaitan secara khusus ke tindakan kecurangan yang berakibat terhadap salah saji material dalam laporan keuangan. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kecurangan oleh auditor dan manajemen perusahaan terbukti ada pada kasus-kasus tersebut. Diantaranya adalah PT. Timah (2016), PT Perusahaan Gas Negara (2016), PT Garuda Indonesia (2019) yang merupakan contoh dari kasus *fraudulent financial statement*.

Pada tahun 2016, PT Timah (Persero) Tbk diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I tahun 2015. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Kondisi keuangan PT Timah sejak tiga tahun belakangan kurang sehat. Ketua Ikatan Karyawan Timah (IKT), Ali Samsuri mengungkapkan, “kondisi keuangan PT Timah sejak tiga tahun belakangan kurang sehat. Ketidakmampuan jajaran Direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha.” Sebelumnya Direksi juga telah mengambil keputusan untuk menutup kegiatan operasi wilayah tambang besar milik PT Timah, yaitu di TB Mapur, TB Nudur dan TB Tempilang yang lalu diserahkan kepada mitra usaha. Jika mengacu pada kondisi nyata yang terjadi di PT Timah, Ali meyakini kalau laporan keuangan semester I (satu) tahun 2015 PT Timah (Persero) Tbk fiktif. Penyebabnya pada semester I (satu) tahun 2015 laba operasi PT Timah telah

mengalami kerugian sebesar Rp 59 milyar. Jadi laporan keuangan yang menyebutkan PT Timah telah berhasil melakukan kegiatan efisiensi dan strategi yang tepat dan membuahkan kinerja positif adalah kebohongan besar (Soda, 2016).

Perusahaan Gas Negara juga memiliki kasus lain yang terjadi pada tahun 2016, yaitu Anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), yaitu PT PGAS Solution, dituding melakukan *mark up* dalam hal penyewaan lahan untuk *stock yard* pipa PGN senilai lebih dari Rp 2 miliar. Ada dugaan *mark up* sewa lahan oleh PT PGAS Solution di Bantar Gebang Bekasi seluas satu hektar di mana harga sewa riil lahan tersebut adalah Rp 400 juta per tahun dengan masa sewa tiga tahun. Hal sewa-menyewa lahan untuk *stock yard* dibuktikan dengan adanya perjanjian yang dinotariskan antara Caroline Cyntia sebagai pemilik lahan dan Niki hikmah sebagai penyewaan perorangan yang tercatat di Kantor Notaris Sri Pancawati dengan nilai sewa lahan Rp 400 juta pertahun. Akan tetapi, dalam perjanjian sewa-menyewa lahan yang sama diatasnamakan PT Indonesia Mega Finlog (IMF) dengan PT PGAS Solution nilai sewa lahan Rp2,41 miliar per tahun. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Tri Sasono mengatakan bahwa sangat tidak masuk akal padahal dari pemilik lahan harga sewa lahan hanya Rp 400 juta pertahunnya menjadi Rp 2,41 miliar/tahun kepada PT PGAS Solution di mana ada dugaan indikasi *mark up* sewa lahan oleh Direksi PGAS Solution sebesar Rp 2 miliar lebih. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian kontrak lahan antara PT IMF dengan PT PGAS Solution yang dibuat 11 Agustus 2015 yang ditandatangani Direktur Utama PGAS Solution Dilo Seno Widagdo (Prayogo, 2016).

Laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) 2018 sedang jadi sorotan. Perolehan laba bersih perusahaan dianggap janggal. Pada 2018 GIAA mencatatkan laba bersih US\$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000). Laba itu berkat melambungnya pendapatan usaha lainnya yang totalnya mencapai US\$ 306,88 juta. Ternyata ada dua komisaris yang enggan menandatangani laporan keuangan itu. Mereka merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan

Konektivitas Dalam Penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia. Pengakuan itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23. Sebab manajemen Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari Mahata sebesar US\$ 239.940.000, yang diantaranya sebesar US\$ 28.000.000 merupakan bagian dari bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Padahal uang itu masih dalam bentuk piutang, namun diakui perusahaan masuk dalam pendapatan. Namun pemegang saham terbesar yakni Pemerintah berpandangan sebaliknya. Mereka menyetujui laporan keuangan tersebut. Menurut Ekonom Indef Enny Sri Hartati apa yang dilakukan Garuda Indonesia termasuk manipulasi penyajian laporan keuangan. Jika terungkap maka akan merusak citra perusahaan. Sebagai pemegang saham terbesar, sudah seharusnya pemerintah melakukan pengawasan melalui komisaris yang ditempatkan. Enny mempertanyakan sikap komisaris perwakilan dari pemerintah di GIAA (Sugianto, 2019).

Dengan adanya kasus skandal *fraudulent financial statement* yang terjadi, maka perusahaan saat ini berupaya lebih teliti dalam memperhatikan laporan keuangan perusahaan agar menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menjelaskan bahwa untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selain itu perusahaan diharuskan untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik agar meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Messier et al. (2014) terdapat tiga kondisi yang sering kali mengacu pada segitiga risiko kecurangan (*fraud risk triangle*) ketika munculnya salah saji material yaitu: Pertama, manajemen dan karyawan lain memiliki kepentingan atau berada di bawah tekanan (*pressure*) yang menjadikan alasan untuk melakukan kecurangan. Kedua, ruang lingkup yang ada memberi kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat dapat merasionalisasi (*rationalization*) tindakan kecurangan. Beberapa

individu memiliki perilaku, karakter, atau seperangkat nilai etika yang mengizinkan mereka secara sadar dan sengaja untuk melakukan tindakan kecurangan.

Fraud bisa terjadi dikarenakan adanya tata kelola perusahaan yang kurang baik, tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keselarasan informasi antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan yang salah satunya terdiri dari dewan komisaris. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2011), Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Kusumawardhani (2013) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang cukup besar dalam perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka akan meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam pencegahan *fraud* pada pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sasongko et al. (2019) dan Kusumawardhani (2013) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh secara negatif terhadap *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih dan Wirajaya (2017), Listyawati (2016), Wicaksono dan Chairiri (2015) menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara menyeluruh juga perlu memerlukan unsur kelembagaan dalam kerangka tata kelola perusahaan seperti komite audit. Komite audit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan

perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (IKAI, 2019). Selain itu komite audit juga harus mempunyai anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Prasetyo (2014) menemukan bahwa ketika semakin banyak anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi maka akan semakin efektif dalam mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Handoko dan Ramadhani (2017), Prasetyo (2014), dan Kamaruddin et al. (2014) menemukan bahwa komite audit berpengaruh secara negatif terhadap *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Listyawati (2016) dan Kamarudin et al. (2014) mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain (Brigham dan Houston, 2010). Siregar dan Utama (2005) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak informasi bagi pihak investor sehubungan dengan investasi yang dilakukan. Perusahaan yang di kategorikan sebagai perusahaan besar memiliki keakuratan dalam menyusun laporan keuangan. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setiawan, 2007). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan semakin akurat dalam menyusun laporan keuangan sehingga menurunkan dampak kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nor et al. (2010) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handoko dan Ramadhani (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Untuk mengetahui perusahaan tersebut terindikasi *fraud* atau tidak juga harus mempertimbangkan tentang informasi finansial seperti kinerja keuangan, dengan adanya kinerja keuangan maka diyakini perusahaan akan mengambil keputusan itu sendiri. Kinerja keuangan yang baik merupakan salah satu tujuan

yang ingin dicapai perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi para pemakai laporan keuangan. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan dapat dengan menggunakan rasio *leverage*. Rasio *leverage* atau solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang (Hery, 2016). Selain itu rasio *leverage* dapat dihitung dengan menggunakan rumus *debt to equity ratio*. Menurut Fahmi (2014) *debt to equity ratio* adalah ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi indikasinya perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sebaliknya perusahaan dengan *debt to equity ratio* rendah dapat membiayai operasional perusahaannya dengan modal sendiri. Semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dengan *debt to equity ratio*, maka diindikasikan perusahaan tersebut melakukan kecurangan laporan keuangan. Penelitian mengenai kinerja keuangan telah dilakukan oleh Pribadi et al. (2018), Zainudin dan Hashim (2016), Listyawati (2016) dan Omoye dan Eragbhe (2014) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh secara positif terhadap *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2014) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Pendeteksian *fraudulent financial statement* terdapat dalam berbagai metode salah satunya adalah metode *beneish m-score* yang digunakan sebagai proksi *fraudulent financial statement*. Hal ini dikarenakan *beneish m-score* dinilai cukup efektif dalam mendeteksi kecurangan dengan tingkat keakuratan sebesar 76% (Nurbaiti & Sariutami, 2016). *Beneish m-score* adalah sebuah metode untuk membantu mengungkap perusahaan yang kemungkinan melakukan *fraud* terhadap pendapatan yang dicatat dalam laporan keuangan (Beneish, 2012). Pengukuran yang digunakan dalam *beneish m-score* terdiri dari *Days' Sales In Receivables Index (DSRI)*, *Gross Margin Index (GMI)*, *Asset Quality Index (AQI)*, *Sales Growth Index (SGI)*, *Depreciation Index (DEPI)*, *Sales General And*

Administrative Expenses Index (SGAI), Leverage Index (LVGI), dan Total Accrual To Total Assets Index (TATA).

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dan inkonsistensi penelitian terdahulu menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan terhadap *Fraudulent Financial Statement* (Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Non-Keluarga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi serta pengambilan keputusan ekonomi bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan seperti investor, karyawan, pemerintah serta lembaga keuangan, dan masyarakat. Hal ini menyebabkan manajemen berupaya sebaik mungkin untuk menampilkan keadaan perusahaan dalam kondisi terbaik. Namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangannya agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut tetap terlihat sehat dan baik.

Dengan kejadian tersebut, informasi yang tercatat akan menjadi bias dan merugikan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian mendalam mengenai *fraudulent financial statement* sehingga risiko-risiko kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan antara lain dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan *fraudulent financial statement* pada perusahaan Badan Usaha

Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?

2. Apakah dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
 - a. Dewan komisaris terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
 - b. Komite audit terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
 - c. Ukuran perusahaan terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
 - d. Kinerja keuangan terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dibuat, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan *fraudulent financial statement* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan secara simultan terhadap *fraudulent financial statement* perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Dewan komisaris terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
 - b. Komite audit terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
 - c. Ukuran perusahaan terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
 - d. Kinerja keuangan terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian dalam penelitian di masa yang akan datang serta dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai *fraudulent financial statement*
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini merupakan media pembelajaran untuk pemecahan kasus *fraudulent financial statement* sebagai referensi dalam pembuatan penelitian sejenis selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi manajemen, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan tambahan dalam menilai resiko dengan memperhatikan seluruh aspek hingga detail dan sebagai pencegahan terjadinya *fraudulent financial statement*.

2. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi investor yang akan menginvestasikan uangnya agar lebih berhati-hati dengan segala kemungkinan yang akan terjadi.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dihimpun dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang telah dipublikasikan melalui situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs korporat masing-masing perusahaan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dengan melakukan pengolahan data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

1.7.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan empat variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah *fraudulent financial statement* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

1.8 Sistematika Penelitian

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu

penting sehingga layak untuk diteliti disertai argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian

BAB III – METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), uji validitas dan analisis data.

BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan. Bab ini juga menjelaskan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.